KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 1 0 9 2 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan					
A. IDENTITAS	PENERIMA PENGHASIL	AN YANG DIPOTONG			•		
A.1 NPWP : 68 807 587 8 722 000							
A.2 NIK : [
A.3 Nama : RETNO EKO SAYEKTI AS							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAR (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
3	21-402-01	2.006.100	2.006.100	0	15	300.915	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 026/SP2D-GU/BLUD-RSJDAHM/III/2022 Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy							
3.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: ΤαραααΙ dd mmm νννν							
Nomor: Tanggal dd mm yyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
	stansi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0	16 2 722	0 0 0			
C.3 ID Subunit Organisasi :			т п п		ПП		
C.4 Tanggal .		1 6 dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5 Nama Penandatangan :		HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bu tandatangani secara elektronik.				tan Unifikasi telah s	aya isi dengan	benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	k mengatur bahwa d	okumen ini tel	ah ditandatangani secara	

GL2LANGS